

Tindak Tutur Ilokusi Politisi DPR DADANG S. ANSHORI



Tiba-tiba kata “setan”, “kurang ajar”, “bangsat”, “daeng” menjadi perbincangan di media publik. Kata-kata tersebut secara leksikon sebenarnya biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun kali ini menjadi lain, karena diucapkan oleh para “selebritis” pansus DPR yang disiarkan langsung melalui media televisi. Adalah Austin (1911-1960) tokoh aliran filsafat bahasa biasa yang banyak menulis tentang penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disebut pragmatik. Analisisnya tentang tuturan performatif, tuturan konstatif, dan tindak tutur (*speech acts*) banyak dirujuk ilmuwan dan peneliti pragmatik untuk mengurai tuturan yang bertebaran di sepanjang jagat wacana ini. Teori ini tentu saja sangat relevan untuk membicarakan diksi-diksi yang diucapkan para “selebritis” pansus di atas.

Prilaku berbahasa para elit akhir-akhir ini bukan hanya menarik perhatian, namun juga menjadi ukuran kualitas komunikasi mereka di depan publik. Pemakaian persona “aku”, “saya”, “anda”, “kau”, “kamu”, “saudara”, atau “bapak”, yang muncul di rapat pansus secara pragmatik mencerminkan untuk maksud apa dan dengan siapa mereka bicara. Belum lagi pertanyaan yang disampaikan anggota pansus menjadi indikator kedalaman penguasaan kasus, arah “sasaran tembak”, dan keberpihakan. Pertanyaan dan jawaban bukan saja menarik dari aspek bahasa dan logika (konsistensi), namun juga menjadi kajian para peneliti bahasa, terutama aliran fungsional.

Sebelum ramai kasus century, pemberitaan tentang kepolisian vs KPK diwarnai prilaku berbahasa “adu sumpah”, hingga kini tidak diketahui siapa yang bohong sumpahnya. Apakah semua pihak yang bersumpah berarti mereka telah jujur apalagi sumpahnya mengatasnamakan Tuhan. Lantas kebenaran yang manakah yang dipercaya masyarakat. Yang jelas, sumpah sudah dijadikan sebagai cara bertutur untuk menyakinkan publik. Bukan hanya karena kasusnya diberhentikan, namun karena sulitnya menganalisis “kejujuran” para pelaku sumpah, hingga kini masyarakat tidak mengetahui ujung sumpah tersebut.

Dalam kasus century, menarik untuk dicermati tuturan performatif yang disampaikan para saksi yang antara satu pihak dengan pihak lain saling bertentangan, terutama mengenai tanggung jawab. Semua pihak “lempar batu sembunyi tangan” sekalipun dalam kapasitas atau jawaban sudah tentu kita dengan mudah dapat menebak siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Namun, fakta kesaksiaan pansus benar-benar membuat pusing publik, karena tidak satu orang pun yang mengatakan bertanggung jawab dalam tuturan langsung atas kasus. Heran memang ada prilaku, tidak ada pelaku. Dalam konteks kesaksiaan, ada indikasi penggunaan bahasa menjadi wujud “penyembunyian” prilaku yang sesungguhnya, dan sedapat mungkin “menghindar” dari fokus masalah. Pengulangan pertanyaan pansus atau penegasan pertanyaan, mungkin karena tidak fokusnya pertanyaan, namun seringkali fokus yang sudah jelas mendapat jawaban yang tidak terang-benderang.

Dalam pendekatan ilmu bahasa pragmatik, sebuah tuturan tidak hanya dilihat dari wujud tuturan (teks), namun juga harus dilihat dari ko-teks dan konteks. Ucapan “jangan marah, Daeng!” dapat berarti sebuah permintaan apabila dilihat hanya dari aspek teks. Namun akan bermakna lain apabila dicermati konteksnya. Ke dalam konteks ini tentu saja ada unsur nonsegmental (intonasi, mimik, gerak tubuh) yang juga mendukung makna yang dilahirkan dari tuturan tersebut. Oleh karena itu, para politisi yang menganalisis ucapan sesama anggota DPR dari aspek kesatuan vs ketidaksantunan menjadi kurang bermakna kalau hanya melihat tuturan (ucapan) sebab ada aspek lain yang harus dicermati. Seorang yang sedang marah, selain ucapan yang dikeluarkan berupa kata-kata yang menunjukkan marah,

juga akan ditunjukkan oleh mata, muka, tangan, nada bicara dan lain-lain. Ketika sebuah media mengkategorikan tuturan menjadi santun vs kasar (bukan marah), ukurannya tidak hanya dilihat dari bentuk tuturan (ucapan). Dan tentu saja antara teks dan konteks atau antara segmental bahasa dan nonsegmental hadir satu paket secara bersama-sama.

Dalam skandal century paling tidak dua kategori pemakaian bahasa yang dapat kita jadikan kajian. Pertama, tentang tindak tutur kesantunan (*politeness*) yang dalam beberapa hal menyimpang (tidak santun, *unpoliteness*). Kata-kata “setan”, “kurang ajar” “bangsat” adalah kata-kata yang secara leksikon bermakna tidak santun dan secara sosiopragmatik tidak patut diucapkan para anggota pansus, apalagi jika dalam pertemuan resmi dan terhormat seperti sidang pansus. Ketidaksantunan ini bukan saja menyiratkan pencitraan yang “berselera rendah”, namun juga dapat menghilangkan hakikat atau fokus permasalahan yang dibahas. Karena itu, pengucapan kata-kata di atas, tidak mungkin terjadi pada situasi normal, pasti pada kondisi emosional (marah). Dengan kata lain, diksi-diksi tersebut mewakili suasana kemarahan seseorang.

Kedua, yang menarik dicermati adalah tuturan performansi, yakni ucapan (kesaksiaan) yang bukan semata-mata memberikan informasi, tetapi juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kesaksiaan dari para saksi tersebut menunjukkan performansi antara yang disampaikan dengan yang dilakukan. Menurut Austin (1961) tuturan performansi mensyaratkan kompetensi penuturnya, kejujuran dari penuturnya, dan kesesuaian perilaku penuturnya. Apabila penutur tersebut tidak memiliki kompetensi sesuai dengan perkara, tidak jujur dalam menyampaikan perkara, dan tidak sesuai antara perilaku dan yang dikatakan, maka batal semua pernyataan tersebut. Dalam konteks ini, kita sedang menunggu siapa yang tuturan performansinya batal alias tidak dapat dipercaya.

Tuturan performansi dalam konsep Islam dinyatakan dalam banyak konsep: “qaulan ma’rufa”, “qaulan bayyina”, “qaulan syadida”, dan “qaulan baligha”. Ucapan yang benar, terang, bernilai, dan komunikatif diperlukan untuk menyampaikan sebuah fakta. Dalam Islam dijelaskan bahwa “besar kebencian Allah SWT bagi orang yang berkata tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan” (QS 61:3). Apalagi kesaksiaan atas fakta disampaikan di bawah ikatan sumpah. Kesimpangsiuran informasi yang terjadi menunjukkan bahwa setiap komunikator kesaksiaan memiliki kepentingan untuk menjaga diri agar tidak masuk pada skenario atau asumsi yang dibangun oleh masing-masing anggota pansus. Hal ini tampak dari beberapa pernyataan antara satu saksi berbeda dengan saksi lain, bahkan saling mengantitesis.

Ilokusi

Tindak tutur kesaksiaan dapat berbentuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kesaksian tidak hanya menyampaikan informasi atau peristiwa (lokusi), tetapi juga merekonstruksi peristiwa dalam sebuah tuturan yang benar. Umumnya rekonstruksi ini yang dapat menentukan apakah kesaksian memiliki tingkat validitas yang tinggi. Tuturan kesaksian hendaknya benar-benar mencerminkan apa yang dilakukan penuturnya (ilokusi). Untuk dapat melihat apakah kesaksian menjadi sebuah ilokusi, harus dibandingkan antara apa yang diucapkan dengan perilaku yang dikerjakan. Semakin jauh dikotomi tuturan dan perbuatan, secara pragmatik semakin besar kemungkinan terjadi pelanggaran prinsip tindak tutur (kualitas, kuantitas, relasi, cara).

Tuturan atau ungkapan seseorang pada dasarnya cermin siapa dirinya. Namun dalam konteks politik seperti pansus, rumus bahasa tersebut tidak selamanya benar, karena bahasa menjadi sebuah permainan. Tokoh filsafat bahasa biasa Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa sesungguhnya adalah alat permainan kepentingan (*language games*). Melalui penggunaan bahasa akan ditemukan beragam kepentingan yang tersurat dan tersirat dan

bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan bahasa untuk “menunjukkan” atau “menyembunyikan” kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut ada yang sifatnya hegemonik atau dominatik.

Permainan bahasa mungkin muncul secara umum dalam bahasa rezim, karena setiap periode kekuasaan selalu melahirkan bahasa rezim. Era Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi ini, masing-masing melahirkan bahasa rezim dengan segala kategorisasinya. Paling tidak, dalam lima tahun terakhir ini kita melihat “politik bahasa pencitraan” mendominasi wacana publik. Walaupun akhirnya publik pun paham bahwa “bahasa pencitraan” tidak identik dengan keberhasilan seorang pemimpin. Bahkan akhir-akhir ini “bahasa pencitraan” tersebut berubah menjadi tindak tutur ekspresif, menyatakan sikap dan emosi yang dialami pribadinya selama ini. Bahasa pencitraan, tentu saja sebagai manifes dari politik pencitraan, mengingat bahasa menjadi instrumen penting melangsungkan proses politik pencitraan tersebut.

Kalau demikian, dari sudut bahasa tentu saja tidak ada bedanya antara rezim revolusioner, rezim pembangunanisme, dan rezim pencitraan. Semuanya melahirkan dominasi wacana dan propaganda simpatik agar masyarakat tumpul dalam mengkritisi kebijakan pemimpinnya. Sekalipun tampak lebih santun, lebih rasional, menggunakan data-data kuantitatif-kualitatif, transparan, dan bercitra demokratis, namun tetap saja rakyat menjadi kelompok yang termarginalkan, sebab semua bentuk propaganda tersebut hakikatnya bukan untuk kepentingan rakyat kecil. Kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi hantu, pendidikan semakin tak terjangkau, hukum identik dengan uang, atau akses rakyat terhadap hak-haknya masih jauh panggang dari api. Bahkan rakyat harus memikul beban berat akibat keegoisan para pemimpinnya dalam menakhodai negeri ini.

Cerdas Berbahasa

Logika bahasa para pemimpin mungkin lebih cerdas dari rakyatnya, walaupun kecerdasan nurani rakyat jauh lebih dekat dengan kebenaran. Dengan melihat semua tindak tutur yang terjadi di pansus, masyarakat terang-benderang mengetahui mana yang berlogika untuk menutupi kepentingannya dan mana yang bekerja berdasarkan logika kebenaran. Seringkali kebenaran nurani masyarakat “dikudeta” oleh mereka dengan mengatasnamakan rakyat, tetapi perilaku bahasanya jauh dari sifat-sifat rakyat. “Kudeta” semacam ini, biasanya dibungkus dengan persepsi dan interpretasi kekuasaan berupa data-data kuantitatif bahkan muncul dalam perilaku-prilaku hipokrit atau “cari muka”.

Eksplorasi berbahasa demikian, bukan hanya menjustifikasi bahwa sebenarnya mereka tidak serius memperjuangkan kebenaran, tetapi juga gagal dalam menyampaikan logika dan argumentasi kekuasaan. Semestinya mereka lebih teratur dalam berpikir dan cerdas dalam berbahasa, terutama logika dan konsistensi kebenaran yang mereka usung. Seringkali masyarakat membaca secara telanjang “pembelaan membabi buta” atau kekeliruan logika dalam perilaku berbahasa para elit politik. Apapun bentuk “permainan bahasa”, yang tidak boleh dilupakan para politisi dan pemimpin bangsa ini adalah bahwa masyarakat kita sudah sangat cerdas.***

Penulis adalah peneliti bahasa politik dan media, dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)